

**DATA KEJADIAN UNJUK RASA
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BULAN : JANUARI S/D DESEMBER 2019**

**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kotawaringin Barat
Bidang : Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional**

No	Jenis Kejadian	Banyaknya	Hari/Tanggal/Tempat Kejadian	Penyebab Kejadian	Kerugian		Keterangan
					Jiwa	Material	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nelayan Desa Kubu Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat	1 Laporan	Hari Senin Tanggal 28 Januari 2019, di Kantor Bupati Kobar Jl. Sutan Syahrir Kel. Sidorejo Pangkalan Bun	150 Nelayan pesisir menyampaikan Aspirasi yang diterima langsung Bupati Kobar Hj Nurhidayah dan Wakil Bupati Kobar Ahmadi Riansyah, Kapolres Kobar AKBP Arie Sandy ZS, Pj Sekda Suyanto dan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kobar Rusliansyah di halaman Kantor Bupati Kobar. Tuntutan Nelayan adalah agar SPBU Bersubsidi Pindah ke Keraya, dimana yang diinginkan para nelayan bukan masalah suplai tetapi pengelolaannya saja harus dipisahkan antara yang bersubsidi dan non bersubsidi, selama ini dijadikan satu di SPBU di desa Kubu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Barat (Kobar) akan memindahkan SPBU khusus nelayan di desa Kubu Kecamatan Kumai ke desa Keraya.	-		Berjalan Aman dan Kondusif
2	LSM Borneo Corruption Watch (BCW)	1 Laporan	Hari Senin Tanggal 18 Februari 2019, di Kantor Kejaksaan Negeri Ktw. Barat Jl. Sutan Syahrir Kel. Sidorejo Pangkalan	Lembaga Swadaya Masyarakat, Borneo Corruption Watch (BCW) Kalteng, menggelar aksi unjuk rasa didepan Kejaksaan Negeri dan Kantor Inspektorat Kotawaringin Barat. Aksi ini dilakukan untuk mendorong supaya penegak hukum dapat menindaklanjuti dugaan tindak	-		Berjalan Aman dan Kondusif

Bun dan Kantor
Inspektorat Jl. Iskandar
Kel. Madurejo
Pangkalan Bun

pidana korupsi yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat, salah satunya terkait dugaan penyelewengan pengelolaan keuangan Desa Ranga Kecamatan Arut Selatan yang telah dilaporkan BCW.
Aksi Unras diikuti sekitar 20 Orang massa dengan penanggung jawab kegiatan Sdr. Ibram Alpandi, SH (Ketua LSM Borneo Corruption Watch (BCW)).

Aksi Unras yang dilakukan oleh LSM Borneo Corruption Watch (BCW) tersebut menurut :

a. Meminta kepada Bambang Dwi Murcolono, SH. MH dalam jabatan sebagai Kajari Kobar terkait penyimpangan dana desa Ranga tahun 2017 dan tahun 2018 yang perkaranya kami laporkan ke Polres Kobar ini tidak mengeluarkan statemen yang sifatnya hanya pencitraan dan kemudian berdampak merugikan kepentingan kami sebagai masyarakat Kobar dalam membantu upaya pencegahan pemberantasan, pengungkapan tindak pidana penggunaan dana desa.

b. Meminta agar data /hasil pemeriksaan Kejari Kobar atas penggunaan keuangan dana Desa Ranga tahun 2017 dan tahun 2018 yang dikatakan tidak bermasalah tersebut di tunjukkan /diberikan kepada kami karena kami menduga hasil pemeriksaan Kejari Kobar (melalui pendampingan TP4D) dan pemeriksaan rutin yang dilakukan oleh Inspektorat Kab. Kobar terhadap penggunaan keuangan dana Desa Ranga tahun 2017 dan 2018 yang dikatakan tak bermasalah tersebut " Penuh rekayasa /kebohongan".

c. Apabila 2 tuntutan itu diabaikan maka kami akan menempuh upaya hukum sesuai perundangan undangan karena Kajari Kobar Bambang Dwi Murcolono, SH. MH dan Kepala Inspektorat Kab. Kobar Agus Suparjo, SH. MH dianggap melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Pelayanan Publik (UUPP) dan Undang-Undang

3	Aliansi Mahasiswa Kobar (Mahasiswa UNTAMA Pangkalan Bun)	1 Laporan	Hari Selasa Tanggal 1 Oktober 2019, di Kantor DPRD Kab. Kobar Jl. H.M. Rafi'i Kel. Madurejo Pangkalan Bun ± 300 mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah (Kalteng), melakukan aksi tolak RUU KUHP di Gedung DPRD Kab. Kobar, Selasa 1 Oktober 2019. Mahasiswa dikawal langsung oleh Kapolres Kobar AKBP Arie Sandy ZS dan Dandim 1014/Pbn Letkol Inf Yudi Rianto Ratu melakukan long march dari kampus Utama Pangkalan Bun di jalan Iskandar Pangkalan Bun menuju Gedung DPRD Kobar di jalan H.M Rafi'i Pangkalan Bun sekitar pukul 09.30 WIB. Wakil Ketua 1 DPRD Kobar Mulyadin bersama sejumlah anggota DPRD Kobar menyambut kedatangan ratusan mahasiswa di depan gerbang DPRD Kobar dan mempersilakan para mahasiswa untuk masuk ke halaman DPRD Kobar. Selain itu, ia juga meminta 20 persen pendemo dibolehkan masuk dan berdialog dengan anggota DPRD. Presiden Domisioner Utama Pangkalan Bun Ahmad Panji Nugraha mengatakan, ada 4 poin RUU KUHP yang kontroversial dengan menyuarakan : - penolakan atas pengesahan revisi UU KPK . - rencana pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP, - menolak RUU Sumber Daya Air, RUU Pertahanan, RUU Ketenagaan - menuntut Penghapusan Diskriminasi Antar Etnis, Penghapusan Kesenjangan Ekonomi Dan Perlindungan Bagi Perempuan.	-	Berjalan Aman dan Kondusif
---	--	-----------	---	---	----------------------------

4	Forum Solidaritas Bela Peladang Ormas AMAN Kabupaten Kotawaringin Barat	1 Laporan	Hari Senin Tanggal 9 Desember 2019, di Kantor Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Jl. Sutan Syahrir Kel. Sidorejo Pangkalan Bun	Aksi Unjuk Rasa dari Forum Solidaritas Bela Peladang Kabupaten Kotawaringin Barat diikuti sekitar 80 Orang, dengan koordinator aksi Mardani (Ketua PD Aman Kobar), Edi (Ketua Kominitas Adat Desa Rungan), Koko (Wartawan Antara Kalteng), diikuti oleh anggota Aliansi Masyarakat Adat Nasional (AMAN), anggota Jurat Pangeran Ratu, Aliansi Mahasiswa Kobar, Kominitas Adat Desa Rungan. Adapun poin-poin tuntutan aksi, sebagai berikut: - Menegaskan kepada setiap orang bahwa praktik berladang adalah upaya mempertahankan hidup, tradisi dan budaya turun temurun masyarakat adat. - Menegaskan bahwa praktek Perladangan Tradisional oleh masyarakat Adat merupakan bentuk kedaulatan mereka terhadap pangan, konsumsi, ekonomi, sosial, budaya serta kedaulatan atas tanah dan ruang hidup. - Hakim harus memperhatikan secara sungguh-sungguh kearifan lokal yang ada di masyarakat sebagaimana tertuang dalam UU PPLH Pasal 69 Ayat 2 dan Hakim harus melihat bahwa kearifan lokal tidak butuh penetapan masyarakat adat. - Menolak pandangan Hakim PN Pangkalan Bun yang menyebut bahwa kearifan lokal harus didahului adanya penetapan masyarakat adat oleh pemerintah. Padahal kearifan lokal sebagai suatu pengetahuan yang ditentukan oleh masyarakat lokal yang diadopsi melalui kumpulan pengalaman dan diintegrasikan dengan pemahaman terhadap budaya alam suatu tempat. - Menegaskan bahwa pembukaan lahan oleh Gusti Maulidin Dkk telah memenuhi kriteria kearifan lokal (maksimal 2 hektar, sekat bakar, varietas lokal dll)	-	Berjalan Aman dan Kondusif
---	---	-----------	---	---	---	----------------------------

5	Aliansi Mahasiswa Kobar dan Forum Solidaritas Bela Peladang / Ormas AMAN Kab. Kobar	1 Laporan	Hari Jum'at Tanggal 20 Desember 2019, di Kantor DPRD Kab. Kobar Jl. H.M. Rafi'i Kel. Madurejo Kec. Arsel Kab. Kobar Aksi Unjuk Rasa dari Aliansi Mahasiswa Kobar dan Forum Solidaritas Bela Peladang / Ormas AMAN Kab. Kobar diikuti sekitar 100 Orang, dengan koordinator aksi Sdr. Mardani (Ketua AMAN Kobar), Sdr. Ramlan (Mahasiswa Utama), Sdr. Jenny Thersia (Perempuan peladang), Sdr. Ismail (Komunitas Rungun), Sdr. Ahmad (Gerdayak). Adapun poin-poin tuntutan aksi, sebagai berikut: - Menuntut Segera DPRD Membuat Produk Hukum Daerah Terkait Perlindungan & Pengakuan Hak Masyarakat Adat Termasuk Tradisi Berladang Di Kotawaringin Barat Sesuai Dengan Amanat Undang-Undang. Dan Harus Dimasukkan Kedalam Program Legislasi Daerah & Disahkan Tahun 2020, Agar Tidak Terjadi Lagi Kriminalisasi Terhadap Masyarakat Adat Di Kemudian Hari - Meminta Jaksa Agung Republik Indonesia Mengevaluasi Kinerja Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pangkajene Dalam Kasus Karhutla Di Kotawaringin Barat - Mendesak Komisi Yudisial Republik Indonesia & Bawas Mahkamah Agung Untuk Mengevaluasi Seluruh Putusan & Kinerja Hakim Terhadap Peladang	sebagaimana pengertian dalam UU PPLH Pasal 69 Ayat 2. - Menuntut penghentian kriminalisasi terhadap seluruh peladang tradisional dalam kasus karhutla, serta menuntut PN Pangkajene Bun membenarkan Gusti Mauludin dan Sarwani dari segala tuntutan hukum.	
---	---	-----------	--	---	--

				Tradisional Dan Kasus-Kasus Karhutla Di Kalimantan Tengah Khusus Nya Kotawaringin Barat. - Mendesak Penegak Hukum Utk Segera Mengadili Kejahatan Kebakaran Hutan dan Lahan yang Dilakukan Oleh Korporasi. Hasil pertemuan massa dan DPRD dituangkan dalam nota kesepahaman yang ditandatangani oleh koordinator massa dan DPRD Kobar, sebagai berikut : - Akan menggelar RDP membahas seluruh tuntutan yang disampaikan Aliansi Mahasiswa Kobar, AMAN kobar dan solidaritas peladang kobar, khususnya tentang produk hukum tentang perlindungan dan pengakuan masyarakat adat kobar. - RDP tersebut dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan organisasi masyarakat adat, akademisi, praktisi hukum, dan NGO terkait lainnya. - RDP tersebut dilaksanakan selambat-lambatnya pada mada sidang ke II tahun sidang 2020(januari-april).		
--	--	--	--	--	--	--

Mengetahui :

**Kepala Bidang Penanganan Konflik
Dan Kewaspadaan Nasional**

Ir. ABDUL MUHS

Nip. 19640706 199503 1 002

Pangkalan Bun, 2 Januari 2020

**Kasubid Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi
Kebijakan Strategis**

AGUS SUGIHARTO, S.Sos

Nip : 19810830 201001 1 011